



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN
MAGETAN**



Jl Pahlawan No 5, Magetan
(0351) 8196742
dpmptsp.magetan.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.

Tujuan Perubahan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Ditetapkan di : Magetan
Tanggal : 2 – Oktober - 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Hubungan antar dokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan	6
1.5. Sistimatika Perubahan Renja SKPD	7
 BAB II EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	
2.1. Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja sampai dengan tribulan II	9
2.2. Telaah terhadap hasil pelaksanaan renja tahun berjalan	16
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Tujuan dan Sasaran	22
3.2. Reviu Terhadap dokumen Perubahan RKPD	22
3.3. Rencana Program dan kegiatan perubahan Renja Perangkat Daerah	32
 BAB IV. PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II	10
Tabel 2.1	Telaah Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025	17
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025	22
Tabel 3.2	Review Dokumen P-RKPD dengan P-Renja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	24
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional, provinsi dan Kabupaten Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 356 disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan didasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya tahun berjalan, dimana menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan Program dan Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Renja Perubahan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kondisi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan tribulan II, dimana dalam pelaksanaannya menunjukan adanya beberapa kebutuhan yang diperlukan sehingga diperlukan usulan perubahan anggaran baik penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan, penyesuaian target sasaran atau target kinerja. Selain itu terdapat perubahan asumsi ekonomi daerah (kerangka pendanaan daerah), adanya perubahan RKPD, Penyesuaian belanja wajib mengikat dan penyesuaian dan pergeseran pagu anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minima (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan, Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguann dan keuangan daerah. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 11 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025–2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 135) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2025 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
27. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025;
28. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

29. Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 5);
30. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang pedoman acuan acuan acuan acuan Dasar penyusunan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 17).

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Magetan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan Renja disebabkan karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi. Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Diagram alir proses penyusunan APBD yang menunjukkan hubungan antara dokumen perencanaan dan anggaran di tingkat pusat dan daerah.

```

graph TD
    subgraph "Pusat"
        KPP[Kebijakan Pemerintah Pusat]
        PKED[Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah]
        KPP --> PKED
        PKED --> DSD[Dasar penyusunan]
    end

    subgraph "Daerah"
        RPJP[RPJP Daerah]
        RPJMD[RPJMD Daerah]
        RKPD[RKPD]
        PRKPD[Perubahan RKPD]
        KUA[KUA PPAS Perubahan]
        PR APBD[Perubahan APBD]
        PR RENSTRA[Perubahan RENSTRA]
        PR RENJA[Perubahan RENJA]
        PR RKA[Perubahan RKA]
        PR R APBD[Rincian Perubahan APBD]
    end

    RPJP -- Pedoman --> RPJMD
    RPJMD -- "dijabarkan" --> RKPD
    RKPD -- "pedoman" --> PRKPD
    PRKPD -- "pedoman" --> KUA
    KUA -- "pedoman" --> PR APBD
    PR APBD -- "dijabarkan" --> PR R APBD

    PRKPD -- "Pedoman" --> PR RENSTRA
    PR RENSTRA -- "Acuan" --> RKPD
    PR RENSTRA -- "Acuan" --> PRKPD
    PR RENSTRA -- "Pedoman" --> PR RENJA
    PR RENJA -- "Pedoman" --> PR RKA
    PR RKA -- "Acuan" --> KUA
    PR RKA -- "Acuan" --> PR R APBD
  
```

Diagram ini menggambarkan alir proses penyusunan APBD. Dokumen di tingkat pusat (Kebijakan Pemerintah Pusat dan Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah) memberikan dasar penyusunan. Di tingkat daerah, RPJP Daerah menjadi pedoman untuk RPJMD Daerah, yang kemudian dijabarkan menjadi RKPD. RKPD menjadi pedoman untuk Perubahan RKPD, yang menjadi pedoman untuk KUA PPAS Perubahan. KUA PPAS Perubahan menjadi pedoman untuk Perubahan APBD. Perubahan APBD kemudian dijabarkan menjadi Rincian Perubahan APBD. Selain itu, Perubahan RKPD juga menjadi pedoman untuk Perubahan RENSTRA, yang menjadi acuan untuk RKPD dan Perubahan RKPD. Perubahan RENSTRA juga menjadi pedoman untuk Perubahan RENJA, yang menjadi pedoman untuk Perubahan RKA. Perubahan RKA menjadi acuan untuk KUA PPAS Perubahan dan Rincian Perubahan APBD.

5

dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- a. Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Perubahan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan disusun dengan berpedoman pada RKPD Perubahan dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja;
- c. Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan disusun dengan memperhatikan dan mengacu perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja;
- d. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran;
- e. Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1.Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.4.2.Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 yaitu :

1. Menyediakan acuan dan panduan dalam menentukan prioritas, program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dan acuan evaluasi tahun 2025;

- 3. Memberikan gambaran kondisi umum Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan;
- 4. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan untuk mengetahui arah kebijakan dan program serta kegiatan tahun 2025.

1.5. Sistematika Perubahan Renja SKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang : Dasar pertimbangan perlu dilakukan perubahan Renja PD yang disertai dengan gambaran tentang Perubahan kerangka pendanaan Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum : Uraian ringkas dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan perubahan Renja PD ,baik yang bersekala nasional maupun lokal
- 1.3 Hubungan antar dokumen : Hubungan Perubahan Renja PD dengan dokumen lain yang relevan (Perubahan RKPD, KUPA dan PPAS perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD) beserta penjelasannya)
- 1.4 Maksud dan Tujuan : Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja PD
- 1.5 Sistematika Penulisan : Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan perubahan renja PD

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II | : | Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja PD sampai dengan tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan renja PD tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan sampai dengan triwulan II (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja PD dengan terget Renstra PD) |
| 2.2 | Telaah Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan | : | Memuat penjelasan pelaksanaan Renja PD tahun berjalan (progres permasalahan dan soluso yang diambil) |

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| 3.1 | Tujuan dan Sasaran | : | Memuat tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RenstraPerangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Juga memuat target capain IKU dan IKD sesuai tusi kewenangan PD setara dengan target d RPJMD dan P-RKPD |
| 3.2 | Reviu Terhadap dokumen Perubahan RKPD | : | Membandikan antara P-RKPD dengan hasil analisis kebutuhan P Renja PD terkait target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran yang terdapat pada masing masing program kegiatan/ sub kegiatan |
| 3.3 | Rencana Program dan kegiatan perubahan Renja Perangkat Daerah | : | Memuat Pergeseran / perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. |

BAB IV : PENUTUP

Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan .

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2025. berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana Kerja ini di selaraskan dengan Rencana Strategis Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029 dalam mencapai visi dan misi yang telah disusun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam periode tertentu.

Pada tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Magetan melaksanakan 6 (enam) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub Kegiatan. Berikut adalah capaian program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2025.

Tabel 2. 1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2025)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (TW II)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan /Tahun 2025 (s.d TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9 = 5+7	10 = 9/4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	100	100	100	50	50.00	100	100.00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	4	1	0	0	-	1	25.00
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Dokumen	1	0	0	0	-	0	0.00
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dokumen	3	1	0	0	-	1	33.33
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang disusun	2	0	1	0	0.00	0	0.00
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dokumen	1	0	0	0	-	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2025)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (TW II)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan /Tahun 2025 (s.d TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9 = 5+7	10 = 9/4
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi Daerah	1	1	1	0	0.00	1	100.00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Cakupan potensi yang dipromosikan	100	100	100	80	80.00	100	100.00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	25	5	5	4	80.00	9	36.00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Dokumen	24	7	5	4	80.00	11	45.83
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota Dokumen	1	0	0	0	-	0	0.00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian Penanaman Modal	100	100	100	30	30.00	100	100.00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1200	218	50	15	30.00	233	19.42
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kegiata Usaha	150	6	0	0	-	6	4.00
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pelaku Usaha	900	200	0	0	-	200	22.22

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2025)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (TW II)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan /Tahun 2025 (s.d TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9 = 5+7	10 = 9/4
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiata Usaha	150	12	50	15	30.00	27	18.00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Operasional Prosedur.	100	100	100	100	100.00	100	100.00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	12	12	12	6	50.00	18	150.00
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen	150	1	1	0	0.00	1	0.67
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha	12750	6086	2000	1251	62.55	7337	57.55
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha	72	75	40	5	12.50	80	111.11
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan	180	12	12	4	33.33	16	8.89

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2025)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (TW II)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan /Tahun 2025 (s.d TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9 = 5+7	10 = 9/4
	perizinan berusaha berbasis risiko	pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Kegiatan Usaha							
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi yang dikembangkan	100	100	100	0	0.00	100	100.00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sistem informasi pengelolaan data yang dikembangkan	5	1	1	0	0.00	1	20.00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Dokumen	5	1	1	0	0.00	1	20.00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN DPMPSTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPSTSP Indeks	90	90	88	0	0.00	90	100.00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen	54	10	18	10	55.56	20	37.04
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	21	7	7	4	57.14	11	52.38
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	33	12	11	6	54.55	18	54.55
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	100	100	100	57.33	57.33	57.33	57.33
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan	28	311	322	138	42.86	449	1603.57

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2025)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (TW II)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan /Tahun 2025 (s.d TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9 = 5+7	10 = 9/4
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan	6	0	12	6	50.00	6	100.00
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	0	0	0	-	0	0.00
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	0	0	0	-	0	0.00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang	50	50	38	0	0.00	50	100.00
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	0	0	0	-	0	0.00
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang	50	50	38	0	0.00	50	100.00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket	252	84	84	40	47.62	100	39.68
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket	12	12	12	6	50.00	18	150.00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket	12	12	12	6	50.00	18	150.00
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	12	12	12	6	50.00	18	150.00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	12	12	12	6	50.00	18	150.00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	12	12	12	4	33.33	16	133.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2025)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (TW II)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan /Tahun 2025 (s.d TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9 = 5+7	10 = 9/4
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen	12	12	12	6	50.00	18	150.00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	12	12	12	6	50.00	18	150.00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	132	36	36	18	50.00	54	40.91
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	12	12	12	6	50.00	18	150.00
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	12	6	50.00	18	150.00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	20	12	12	6	50.00	18	90.00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit	20	18	18	12	66.67	18	90.00
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	18	16	16	8	50.00	24	133.33
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit	2	2	2	0	0.00	2	100.00

2.2 Telaah terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun Berjalan

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, akan diketahui realisasi program atau kegiatan baik yang memenuhi target kinerja yang direncanakan maupun yang tidak memenuhi target kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengukur sampai dimana keberhasilan kinerja OPD berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja dan pencapaian anggaran menunjukkan bahwa sampai dengan tribulan kedua penggunaan anggaran yang efisien, efektifitasnya mulai terlihat pada capaian nilai investasi sebagai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terealisasi sampai dengan tribulan II. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berupaya mendorong peningkatan nilai realisasi investasi di Kabupaten Magetan dengan melaksanakan pendampingan bagi investor dalam penyusunan laporan kinerja penanaman modal, memberikan iklim penanaman modal yang kondusif serta melaksanakan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan/hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam berinvestasi. Selain itu dalam hal urusan pelayanan terpadu satu pintu mengoptimalkan proses pelayanan terpadu melalui intergrasi layanan di Mal Pelayanan Publik. Adapun telaah atas hasil pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2. 2
Telaah Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magetan Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
1	2	3			4			5			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	6	7		
Volume	Satuan	Volume		Satuan		K	Rp				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	100	%	24,667,000	0	%	-	50.00	0.00		
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0.00	-		
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0.00	-		
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0.00	-		
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang disusun	1	Dokumen	24,667,000	0	Dokumen	-	0.00	0.00		
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0.00	-		
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi Daerah	1	Daerah	24,667,000	1	Daerah	-	0.00	0.00	Kegiatan akan di laksanakan di TW IV setelah penetapan P- APBD	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
1	2	3			4			5			
		Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K	Rp		
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Cakupan potensi yang dipromosikan	100	%	401,153,000	50	%	46,459,500	80.00	11.58		
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	8	Dokumen	401,153,000	2	Dokumen	46,459,500	16.00	11.58		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Dokumen	8	Dokumen	401,153,000	4	Dokumen	46,459,500	16.67	11.58		
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0.00	-		
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian Penanaman Modal	100	%	10,000,000	50	%	4,275,000	30.00	42.75		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	218	Pelaku Usaha	10,000,000	15	Pelaku Usaha	4,275,000	1.25	42.75		
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kegiata Usaha	0	Kegiatan Usaha	-	0	Kegiatan Usaha	-	0.00	-		
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pelaku Usaha	10	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0.00	-		
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiata Usaha	50	Kegiatan Usaha	10,000,000	15	Kegiatan Usaha	4,275,000	10.00	42.75		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Operasional Prosedur.	100	%	197,217,000	100	%	71,923,500	100.00	36.47		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
1	2	3			4			5			
		Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K	Rp		
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	12	Bulan	197,217,000	6	Bulan	71,923,500	50.00	36.47		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen	1	Dokumen	3,662,000	0	Dokumen	-	0.00	0.00		
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha	2000	Pelaku Usaha	146,179,000	1251	Pelaku Usaha	66,891,000	9.81	45.76		
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha	40	Pelaku Usaha	31,736,000	5	Pelaku Usaha	1,007,500	6.94	3.17		
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Kegiatan Usaha	12	Kegiatan Usaha	15,640,000	4	Kegiatan Usaha	4,025,000	2.22	25.74		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi yang dikembangkan	100	%	43,255,000	0	%	-	0.00	0.00		
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sistem informasi pengelolaan data yang dikembangkan	1	Aplikasi	43,255,000	0	Aplikasi	-	0.00	0.00		
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	1	Dokumen	43,255,000	0	Dokumen	-	0.00	0.00	Kegiatan akan di laksanakan di TW IV setelah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
1	2	3			4			5			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	6	7		
Volume	Satuan	Volume		Satuan		K	Rp				
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Dokumen									penetapan P-APBD	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN DPMTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMTSP Indeks	88	Indeks	4,472,404,616	90	Indeks	1,892,718,621	0.00	42.32		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen	18	Dokumen	27,872,000	10	Dokumen	675,000	18.52	2.42		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	7	Dokumen	1,000,000	4	Dokumen	675,000	19.05	67.50		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	11	Laporan	26,872,000	6	Laporan	-	18.18	0.00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	100	%	3,002,768,192	57.33	%	1,417,451,647	57.33	47.20		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan	322	Orang/ Bulan	2,999,768,192	138	Orang/ Bulan	1,417,451,647	492.86	47.25		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan	12	Laporan	3,000,000	6	Laporan	-	100.00	0.00		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0.00	-		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0.00	-		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang	38	Orang	54,518,000	0	Orang	-	0.00	0.00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Stell	-	0	Stell	-	0.00	-		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang	38	Orang	54,518,000	0	Orang	-	0.00	0.00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket	84	Paket	446,751,288	40	Paket	136,055,310	15.87	30.45		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
1	2	3			4			5			
		Volume	K Satuan	Rp	Volume	K Satuan	Rp	K	Rp		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket	12	Paket	26,500,000	6	Paket	13,230,250	50.00	49.93		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket	12	Paket	223,286,288	6	Paket	71,613,500	50.00	32.07		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	12	Paket	30,000,000	6	Paket	14,193,350	50.00	47.31		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	12	Paket	62,880,000	6	Paket	14,374,700	50.00	22.86		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket	12	Paket	16,585,000	4	Paket	1,955,600	33.33	11.79		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen	12	Dokumen	9,500,000	6	Dokumen	3,805,000	50.00	40.05		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	12	Laporan	78,000,000	6	Laporan	16,882,910	50.00	21.64		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	36	Laporan	711,045,136	18	Laporan	296,191,470	13.64	41.66		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	12	Laporan	182,770,136	6	Laporan	68,236,180	50.00	37.33		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	12	Laporan	60,000,000	6	Laporan	20,600,000	50.00	34.33		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	12	Laporan	468,275,000	6	Laporan	207,355,290	30.00	44.28		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit	18	Unit	229,450,000	12	Unit	42,345,194	60.00	18.46		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	16	Unit	100,000,000	8	Unit	42,345,194	44.44	42.35		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
1	2	3			4			5			
		K		Rp	K		Rp	K	Rp		
		Volume	Satuan		Volume	Satuan					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit	2	Gedung	129,450,000	0	Gedung	-	0.00	0.00		
TOTAL & RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025				5,148,696,616			2,015,376,621	43.33	39.14		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Dan Sasaran

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam proses penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tujuan Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu : Meningkatnya Jumlah Investor, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima, dan Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan. Adapun target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Target Tujuan dan Sasaran Perubahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Magetan Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			RENJA 2025	P-RENJA 2025	AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Daya Tarik Investasi		Nilai Realisasi Investasi	700 Milyar	700 Milyar	740 Milyar
	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin	4200	6086	4400
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98	98.92	98.20
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPMPSTP	Nilai SAKIP DPMPSTP Magetan	94.25	95	95.52

Pada tahun 2025 telah ditetapkan kepala daerah baru untuk periode kepemimpinan Tahun 2025-2029 hal ini tentunya berdampak pada strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai oleh kepala daerah. Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Perubahan tersebut salah satunya berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang akan di capai oleh Perangkat Daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Magetan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Tujuan dan Sasaran Perubahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Magetan Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			RENJA 2025	P-RENJA 2025	AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi	700 Milyar	700 Milyar	740 Milyar
	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	4200	6086	4400
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98	98.92	98.20
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	94.25	95	95.52

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat perubahan target capaian kinerja sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP triwulan kedua yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB.

3.2. Review terhadap Dokumen Perubahan RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya ,

serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) disajikan dalam tabel 3.2

Tabel 3. 2

Review Dokumen P-RKPD dengan P-Renja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	675.000	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	675.000
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	11 Dokumen	26.833.000	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	11 Dokumen	26.833.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	25 Orang/ Bulan	2.906.289.589	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	25 Orang/ Bulan	2.906.289.589
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.000.000	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.000.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	45 Orang	54.518.000	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	45 Orang	54.518.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	26.500.000	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	26.500.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	187.452.991	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	187.452.991
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	30.000.000	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	30.000.000
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	62.880.000	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	62.880.000
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	17.882.355	e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	17.882.355
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	9.500.000	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	9.500.000
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	78.000.000	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	78.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	162.769.448	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	162.769.448
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	60.000.000	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	60.000.000
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	422.075.000	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	422.075.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	16 Unit	100.000.000	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	16 Unit	100.000.000
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	2 Unit	189.450.000	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	2 Unit	189.450.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	a. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
a. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	1 Daerah	83.665.000	a. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	1 Daerah	83.665.000
Program Promosi Penanaman Modal					Program Promosi Penanaman Modal				
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman	Kab. Magetan, Magetan, Semua	5 Dokumen	236.775.000	b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman	Kab. Magetan, Magetan,	5 Dokumen	236.775.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
Modal Daerah Kabupaten/Kota	Modal Kabupaten/Kota	Kelurahan			Modal Daerah Kabupaten/Kota	Modal Kabupaten/Kota	Semua Kelurahan		
Program Pelayanan Penanaman Modal					Program Pelayanan Penanaman Modal				
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.299.000	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.299.000
b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	6086 Pelaku Usaha	315.259.000	b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	6086 Pelaku Usaha	315.259.000
c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	40 Pelaku Usaha	87.022.150	c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	40 Pelaku Usaha	87.022.150

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
	Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Kegiatan Usaha	13.440.000	d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Kegiatan Usaha	13.440.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	0 Kegiatan Usaha	0	a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	0 Kegiatan Usaha	0
b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	0 Pelaku Usaha	0	b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	Kab. Magetan, Magetan, Semua	0 Pelaku Usaha	0

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
	Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kelurahan		
c. Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Kegiatan Usaha	15.000.000	c. Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Kegiatan Usaha	15.000.000
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	172.932.480	a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	172.932.480

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
Terintegrasi secara Elektronik	Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
TOTAL				5.265.218.012	TOTAL				5.265.218.012

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sesuai dengan usulan Perubahan Program Kegiatan Tahun 2025 pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							5,708,721,715.00	5,315,591,616.00	5,265,218,012.00	-443,503,703.00			7,512,985,864.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5,708,721,715.00	5,315,591,616.00	5,265,218,012.00	-443,503,703.00			7,512,985,864.00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5,708,721,715.00	5,315,591,616.00	5,265,218,012.00	-443,503,703.00			7,512,985,864.00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				88 Angka	88 Angka	4,552,685,715.00	4,554,299,616.00	4,337,825,382.00	1,130,300,149.00			5,682,985,864.00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu				18 Dokumen	100 %	38,872,000.00	38,872,000.00	27,508,000.00	-11,364,000.00			100,000,000.00
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	675,000.00	-4,325,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30,000,000.00
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	33,872,000.00	33,872,000.00	26,833,000.00	-7,039,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70,000,000.00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	2,970,049,291.00	2,971,663,192.00	2,909,289,588.50	-60,759,702.50			3,145,485,864.00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	2,967,049,291.00	2,968,663,192.00	2,906,289,588.50	-60,759,702.50	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3,115,485,864.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30,000,000.00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Layanan Kepegawaian				38 Orang	45 Orang	54,518,000.00	54,518,000.00	54,518,000.00	0.00			190,000,000.00
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70,000,000.00
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				38 Orang	45 Orang	54,518,000.00	54,518,000.00	54,518,000.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		120,000,000.00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Layanan Administrasi Umum				84 Paket	12 Bulan	488,751,288.00	488,751,288.00	412,215,345.50	-76,535,942.50			772,500,000.00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26,500,000.00	26,500,000.00	26,500,000.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45,000,000.00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	223,286,288.00	223,286,288.00	187,452,990.50	-35,833,297.50	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		325,000,000.00
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55,000,000.00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	62,880,000.00	62,880,000.00	62,880,000.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		90,000,000.00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16,585,000.00	16,585,000.00	17,882,355.00	1,297,355.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		65,000,000.00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17,500,000.00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120,000,000.00	120,000,000.00	78,000,000.00	-42,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		175,000,000.00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				36 Laporan	36 Laporan	771,045,136.00	771,045,136.00	644,844,448.00	-126,200,688.00			1,065,000,000.00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	182,770,136.00	182,770,136.00	162,769,448.00	-20,000,688.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		225,000,000.00
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		90,000,000.00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	528,275,000.00	528,275,000.00	422,075,000.00	-106,200,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		750,000,000.00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	229,450,000.00	229,450,000.00	289,450,000.00	60,000,000.00			410,000,000.00
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		110,000,000.00
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 Unit	2 Unit	129,450,000.00	129,450,000.00	189,450,000.00	60,000,000.00	DANA ALOKASI		300,000,000.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20
		yang Dipelihara/Direhabilitasi										UMUM (DAU)		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi				100 %	100 %	24,667,000.00	24,667,000.00	83,665,000.00	60,333,000.00			85,000,000.00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal				0 Dokumen	0 %	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000,000.00
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko													
		Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25,000,000.00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Potensi / Peluang Penanaman Modal yang Telah di Petakan				-	100 %	24,667,000.00	24,667,000.00	83,665,000.00	58,998,000.00			60,000,000.00
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)													
		Jumlah daerah yang telah dilaksanakan data pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	1 Daerah	24,667,000.00	24,667,000.00	83,665,000.00	58,998,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60,000,000.00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan				100 %	100 %	466,153,000.00	466,153,000.00	236,775,000.00	183,847,000.00			650,000,000.00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal				8 Kali	5 Kegiatan	466,153,000.00	466,153,000.00	236,775,000.00	-229,378,000.00			650,000,000.00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				8 Dokumen	5 Dokumen	466,153,000.00	466,153,000.00	236,775,000.00	-229,378,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		650,000,000.00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan				100 %	100 %	202,217,000.00	202,217,000.00	419,020,150.00	192,783,000.00			395,000,000.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Perizinan yang di Terbitkan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP				2053 Dokumen	100 %	202,217,000.00	202,217,000.00	419,020,150.00	216,803,150.00			395,000,000.00
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	8,662,000.00	8,662,000.00	3,299,000.00	-5,363,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	6086 Pelaku Usaha	146,179,000.00	146,179,000.00	315,259,000.00	169,080,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		250,000,000.00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko													
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				40 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	31,736,000.00	31,736,000.00	87,022,150.00	55,286,150.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60,000,000.00
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	15,640,000.00	15,640,000.00	13,440,000.00	-2,200,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35,000,000.00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di				100 %	100 %	414,744,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	135,256,000.00			550,000,000.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20
		Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha												
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal yang disusun				250 Pelaku Usaha	4 Laporan	414,744,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	-399,744,000.00			550,000,000.00
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				50 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha.	59,211,000.00	0.00	0.00	-59,211,000.00	DAK NON FISIK		75,000,000.00
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				250 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	227,110,000.00	10,000,000.00	0.00	-227,110,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK		300,000,000.00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	128,423,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	-113,423,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK		175,000,000.00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				100 %	100 %	48,255,000.00	48,255,000.00	172,932,480.00	101,745,000.00			150,000,000.00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tersedia dan Terupdate				1 Dokumen	100 %	48,255,000.00	48,255,000.00	172,932,480.00	124,677,480.00			150,000,000.00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	2 Dokumen	48,255,000.00	48,255,000.00	172,932,480.00	124,677,480.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150,000,000.00
J U M L A H								5,708,721,715.00	5,315,591,616.00	5,265,218,012.00	-443,503,703.00			7,512,985,864.00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025. Dengan Perubahan Rencana Kerja ini, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih baik, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tahun 2025-2029. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001